

**KAJIAN YURIDIS PASAL 73 UNCLOS 1982 TENTANG PENEGAKAN
HUKUM SUATU NEGARA PANTAI DALAM TERJADINYA TINDAK
PIDANA *IUU FISHING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
(STUDI KASUS TERTANGKAPNYA KAPAL PERIKANAN KWAY FEY
CINA PADA TAHUN 2016 Di WPP RI)**

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NADYA

1810012111147

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No.7/HI/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

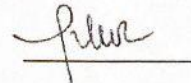
PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg : 7/HI/02/II-2022

Nama : Nadya
Nomor : 1810012111147
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Pasal 73 UNCLOS 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana *IUU Fishing* dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Tertangkapnya Kapal Perikanan Kway Fey Cina pada Tahun 2016 di WPP RI)**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

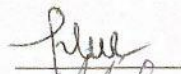


PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 7/HI/02/II-2022

Nama : Nadya
Nomor : 1810012111147
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Pasal 73 UNCLOS 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana *IUU Fishing* dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Tertangkapnya Kapal Perikanan Kway Fey Cina pada Tahun 2016 di WPP RI)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Internasional** pada hari **Kamis** Tanggal **Tujuh Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Narzif, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Surya Prahara, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**JURIDICAL STUDY ARTICLE 73 UNCLOS 1982 CONCERNING LAW
ENFORCEMENT OF A COAST COUNTRY IN THE OCCURATION OF THE
CRIME OF IUU FISHING AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA (**
CASE STUDY OF THE CAPTURE OF THE CHINESE KWAY FEY
FISHERY SHIP IN 2016 in WPP REPUBLIC OF INDONESIA)

Nadya¹, Dwi Astuti Palupi¹,S.H.,M.H

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Nadya.46allysaakbar@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country that has various problems in managing marine resources such as illegal fishing. Article 73 of UNCLOS 1982 explains that the coastal state in exercising its sovereign rights can board ships, inspect, arrest and process courts, as necessary to ensure compliance with the laws and regulations established in accordance with the provisions of the convention. However, there are still rampant violations that occur, for example the case of KM Kway Fey 10078 which is carrying out Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU) practices in the territory of the Indonesian state. brought by the Indonesian government as evidence in court, therefore the Chinese government of China has intervened against the existing law. Problem Formulation: (1) How does 1982 UNCLOS regulate law enforcement or law enforcement against law violations that occur in the marine territory of a country? (2) How is the juridical study regarding the capture of Chinese fishing vessels that commit fisheries crimes in the WPP RI in 2016? The research method used is a normative research method. The data sources used are secondary and primary data sources. After the data was obtained, the writer analyzed the data qualitatively. The conclusion of this study is that the coastal State as a sovereign state over its territory can enforce the law on violators of the State according to the applicable rules, to ensure compliance with the laws and regulations stipulated in accordance with the 1982 UNCLOS Convention.

Keyword : IUU Fishing, UNCLOS 1982, Enforcement Law Of Coastal Country

**KAJIAN YURIDIS PASAL 73 UNCLOS 1982 TENTANG PENEGAKAN
HUKUM SUATU NEGARA PANTAI DALAM TERJADINYA TINDAK
PIDANA *IUU FISHING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ((
STUDI KASUS TERTANGKAPNYA KAPAL PERIKANAN KWAY FEY
CINA PADA TAHUN 2016 Di WPP RI)**

Nadya¹, Dwi Astuti Palupi¹,S.H.,M.H

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Nadya.46allysaakbar@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai permasalahan di pengelolaan sumber daya kelautan seperti *illegal fishing*. Di dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 menjelaskan negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan memproses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi. Namun masih marak terjadinya pelanggaran yang terjadi, seperti contoh kasus KM Kway Fey 10078 yang sedang melakukan praktik *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU)* di wilayah negara Indonesia, sesaat setelah tertangkap tiba – tiba saja kapal Cina Tiongkok menabrak kapal KM Kway Fey yang akan dibawa pemerintah Indonesia sebagai barang bukti di Pengadilan, maka dari ini pemerintah Cina Tiongkok telah melakukan Intervensi terhadap hukum yang sudah berlaku. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah UNCLOS 1982 mengatur tentang penegakan hukum atau penegakan perundang – undangan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut suatu negara? (2) Bagaimanakah kajian yuridis tentang tertangkapnya kapal ikan Cina yang melakukan tindak pidana perikanan di WPP RI Tahun 2016? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer. Setelah data diperoleh penulis menganalisa data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Negara pantai sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya dapat melakukan penegakan hukum kepada Negara pelanggar sesuai aturan yang berlaku, untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang – undangan yang ditetapkan sesuai ketentuan Konvensi UNCLOS 1982.

Kata Kunci : *IUU Fishing*, UNCLOS 1982, Penegakan Hukum Negara Pantai

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PASAL 73 UNCLOS 1982 TENTANG PENEGAKAN HUKUM SUATU NEGARA PANTAI DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA *IUU FISHING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS TERTANGKAPNYA KAPAL PERIKANAN *KWAY FEY* CINA PADA TAHUN 2016 DI WPP RI)”**. Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah, Ibu, Kakek dan Nenek tercinta Ali Akbar, Lisa Sri Dwiyana, Marwan Arifin, Nurmaini yang selalu memberikan dukungan dan pengorbanan kepada penulis baik moril maupun materil, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis, dan kepada abang penulis Abrar Nabil. Serta terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M, Hum. selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ketua bagian Hukum Internasional Deswita Rosra S.H. M.H yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan penyempurnaan karya tulis akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Deswita Rosa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah S.W.T Amin ya rabbal allamin.

Padang, Februari 2022

NADYA

1810012111147

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRACT | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGHANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | 8 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B.Rumusan Masalah..... | 10 |
| C.Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D.Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A.Pengertian dan Pengaturan Tentang ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).... | 14 |
| B.Pengertian Tentang <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> | 20 |
| C.Pengertian Tentang Perairan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982..... | 25 |
| D.Peraturan Zona Laut dalam UNCLOS 1982..... | 27 |
| E.Hak dan Kewajiban Negara di ZEE Sebagai Negara Pantai Menurut UNCLOS 1982..... | 33 |
| F.Pengertian Tentang Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>)..... | 39 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |

| | |
|---|----|
| A. Aturan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang terjadi di Wilayah Negara Pantai Menurut UNCLOS 1982..... | 43 |
| B. Kajian Yuridis Terhadap Penangkapan Ikan Kway Fey 10078 Cina di Perairan Indonesia Tahun 2016..... | 56 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA